



LAPORAN

**MONITORING, EVALUASI DAN TINDAK LANJUT
HASIL SURVEI PERSEPSI KUALITAS PELAYANAN (SPKP)
dan SURVEI PERSEPSI ANTI KORUPSI (SPAK)**



**TRIWULAN III
TAHUN 2025**

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA YOGYAKARTA



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER
DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA SURABAYA
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA YOGYAKARTA**

Jalan Raya Janti Nomor 66 Kec. Banguntapan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55198
www.ptun-yogyakarta.go.id, ptunjogja@mahkamahagung.go.id

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan karunia-Nya Laporan Monitoring, Evaluasi Dan Tindak Lanjut Hasil Survei Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP) Dan Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK) pada Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta periode Triwulan III Tahun 2025 dapat disusun dengan baik.

Penyusunan laporan ini merupakan bentuk komitmen terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik dan penguatan integritas dalam penyelenggaraan layanan. Survei SPKP dan SPAK menjadi instrumen penting dalam mengetahui persepsi masyarakat terhadap kinerja dan integritas unit pelayanan, serta menjadi dasar dalam merumuskan strategi perbaikan dan tindak lanjut yang tepat sasaran.

Akhir kata, kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam pelaksanaan survei dan penyusunan laporan ini. Kami juga terbuka terhadap berbagai masukan yang membangun guna menyempurnakan laporan ini ke depannya. Semoga laporan ini dapat memberikan manfaat serta menjadi acuan dalam peningkatan kualitas pelayanan dan integritas di masa yang akan datang.

Yogyakarta, 9 Oktober 2025

Ketua, 

Dr. Nelvy Christin, S.H., M.H.

A. Latar Belakang

Laporan monitoring dan evaluasi hasil Survey Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP) serta Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK) merupakan instrumen penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). SPKP bertujuan untuk mengukur sejauh mana kualitas layanan publik dirasakan oleh masyarakat sebagai pengguna layanan, sedangkan SPAK difokuskan pada penilaian masyarakat terhadap upaya pencegahan dan pemberantasan praktik korupsi di lingkungan instansi pemerintah.

Kedua survei ini menjadi tolok ukur penting dalam menilai efektivitas kinerja organisasi pemerintah, terutama dalam hal transparansi, akuntabilitas, serta integritas penyelenggaraan pelayanan publik. Hasil survei tidak hanya berfungsi sebagai gambaran tingkat kepuasan dan persepsi masyarakat, tetapi juga menjadi dasar perumusan kebijakan dan strategi peningkatan kualitas pelayanan serta penguatan integritas aparatur.

Oleh karena itu, diperlukan kegiatan monitoring dan evaluasi secara berkala untuk memastikan hasil survei benar-benar ditindaklanjuti. Tindak lanjut ini penting agar rekomendasi yang dihasilkan dari SPKP dan SPAK tidak berhenti pada tahap pengukuran semata, tetapi mampu memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan kualitas layanan publik, memperkuat kepercayaan masyarakat, serta mendukung terwujudnya birokrasi yang bersih, efektif, dan berorientasi pada pelayanan.

B. Tujuan/Manfaat

Tujuan dilakukannya monitoring dan evaluasi Survei Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP) dan Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK) ini adalah:

1. Untuk mengetahui proses, perkembangan, kemajuan, dan kendala yang dihadapi atas proses pengelolaan survei SPKP dan SPAK di Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta;
2. Untuk menjadi bahan masukan dalam menindaklanjuti permasalahan dan hambatan kebijakan pengelolaan survei SPKP dan SPAK di Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta.

C. Ruang Lingkup Monitoring

Sesuai Permenpan Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Persepsi Kualitas Pelayanan Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. dan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengusulan dan Evaluasi Zona Integritas 2023 Salah satu wujud komitmen tersebut yaitu dengan disusunannya survei kepuasan masyarakat yang menjadi salah satu parameter pemerintahan yang bersih dan melayani.

D. Pelaksanaan Monitoring Di Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta

Pelaksanaan monitoring pengelolaan Survei Kepuasan Masyarakat di Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta dilaksanakan oleh Kepaniteraan Muda Hukum bersama unsur pimpinan. Monitoring dilakukan secara berkelanjutan sepanjang tahun anggaran dan dilaksanakan setiap triwulan. Hasil monitoring dimanfaatkan sebagai dasar untuk mengidentifikasi permasalahan yang muncul serta menjadi bahan pertimbangan pimpinan dalam menentukan langkah solusi guna meningkatkan efektivitas pengelolaan survei kepuasan masyarakat.

Hasil monitoring yang diperoleh selanjutnya digunakan sebagai instrumen penting dalam mengidentifikasi berbagai kendala atau permasalahan yang timbul selama proses pengelolaan survei. Selain itu, temuan dari kegiatan monitoring juga dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi pimpinan dalam merumuskan kebijakan, mengambil keputusan strategis, serta menetapkan langkah-langkah solutif yang diperlukan untuk meningkatkan kualitas pengelolaan Survei Kepuasan Masyarakat. Dengan demikian, kegiatan monitoring ini memiliki peran yang signifikan dalam mendorong efektivitas, akuntabilitas, dan keberlanjutan pengelolaan survei, sehingga tujuan utama peningkatan kualitas pelayanan publik di lingkungan Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta dapat tercapai secara optimal.

E. Mekanisme Pelaksanaan Monitoring

Mekanisme pelaksanaan monitoring Pengelolaan SPKP dan SPAK di Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta dilakukan dengan cara antara lain:

1. Menggunakan dokumen dan/atau laporan pelaksanaan survei kepuasan masyarakat;

https://drive.google.com/file/d/1QRY7uiWJp6N0WC9bKCiqdj40sEJPaUsH/view?usp=drive_link,

https://drive.google.com/file/d/192v_FtwfM3IRL_ASbLAFDbq5-caK94lv/view?usp=drive_link

2. Memantau langsung kegiatan pengelolaan survei kepuasan masyarakat di Kepaniteraan Muda Hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta.

F. Hasil Monitoring, Evaluasi dan Tindak Lanjut

Hasil Monitoring, Evaluasi dan Tindak Lanjut berdasar survei SPKP dan SPAK di Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta baik melalui kehadiran secara langsung ataupun melalui website Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta (*online*):

No	Triwulan/Tahun	Saran Responden	Tindak Lanjut	Keterangan
	Triwulan III/2025	nihil	nihil	

G. Kesimpulan dan Rekomendasi

Kesimpulan:

Bahwa setiap perubahan yang dilakukan di Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta sangat efektif dan dapat meningkatkan layanan dan kepuasan masyarakat sebagai pengguna layanan, untuk dipertahankan dan ditingkatkan lagi.

Bahwa terhadap pelayanan Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta dari bulan Juli-September tahun 2025 menunjukan bahwa SPKP mayoritas memiliki Indeks rata rata 98,63. Dan SPAK 98,93 atau masuk pada kategori A (Sangat Baik).

Bahwa survei masyarakat sangat diperlukan untuk kontroling, perbaikan dan peningkatan terhadap peningkatan layanan masyarakat atau pengawasan dalam pelaksanaan tugas dan pekerjaan di Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta.

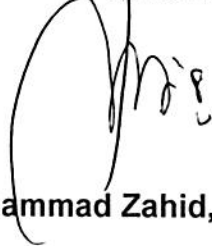
Rekomendasi:

- a. Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta untuk tetap menjaga integritasnya dan pelayanan yang sudah baik untuk tetap di pertahankan dan lebih baik lagi;
- b. Survei untuk tetap dilaksanakan secara elektronik dan manual;
- c. Monitoring Evaluasi dan Tindak Lanjutnya untuk secara berkala tetap dilaksanakan;
- d. Pembinaan dan Pengawasan kepada Pegawai dan Petugas layanan meja PTSP untuk dilakukan secara rutin.
- e. Menetapkan Responden yang Prima untuk survey;

Demikian laporan monitoring dan evaluasi serta tindak lanjut Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), agar dapat jadi bahan perbaikan di masa akan datang.

Yogyakarta, 9 Oktober 2025

Panitera,



Mohammad Zahid, S.H., M.H.

Panitera Muda Hukum,



Tri Asih Wahyudiati, S.H., M.Kn.

Mengetahui:

Ketua,



Dr. Nelvy Christin, S.H.

LAMPIRAN

Notula Rapat Monev beserta lampirannya



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER
DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA SURABAYA
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA YOGYAKARTA**

Jalan Raya Janti Nomor 66 Kec. Banguntapan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55198
www.ptun-yogyakarta.go.id, ptunjogja@mahkamahagung.go.id

NOTULA

Dasar : Undangan Rapat Nomor 2240/WKPTUN/UND.OT1.2/X/2025
Hari : Kamis
Tanggal : 9 Oktober 2025
Pukul : 09.00 WIB
Tempat : Ruang Pemeriksaan Persiapan
Acara : Rapat Monev SPKP - SPAK
Peserta Rapat :

1. Dr. Nelvy Christin, S.H., M.H. (Ketua PTUN Yogyakarta)
2. Nieke Zulfahanum, S.H., M.H. (Hawasbid Kepaniteraan Hukum)
3. Mohammad Zahid, S.H., M.H. (Panitera)
4. Tri Asih Wahyudiati, S.H., M.Kn. (Panitera Muda Hukum)
5. Budi Suryana, S.H.
6. Rahmat Susanta, S.H.
7. Andrie Wibowo, S.H.
8. Rifiani Rina M, S.Psi.
9. Rizkityas Sekar Handini, S.H.
10. Nanda Padma Parahita, S.H.
11. Rizky Ramadhan Baried, S.H., M.H. (Direktur LKBH FH UII)

Jalannya Rapat:

Rapat Monev SPKP-SPAK dibuka oleh Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta Ibu Retno Nawangsih, S.H., M.H. Adapun inti dari rapat ini adalah:

Panitera Muda Hukum

- a. Menjelaskan bahwa nilai SPKP-SPAK pasti mengalami kenaikan sebesar nol koma dimaksudkan agar tidak menjadi 100% lebih pada saat penilaian WBBM.
- b. Menjawab pertanyaan Wakil Ketua bahwa responden survey adalah tamu yang baru berkunjung ke PTUN Yogyakarta, dengan bobot pihak

terkait tupoksi Pengadilan 50%, tamu umum seperti dosen, dll 30% dan mahasiswa 20%.

Wakil Ketua

Menanyakan terkait responden survey itu didapatkan dari mana saja?

Ketua

- a. Memberikan himbauan agar tim survey dapat memastikan dan menyiapkan responden yang loyal, rutin berkunjung, memiliki komunikasi yang baik, dan ketika dihubungi mau membantu. Agar nanti ketika dihubungi secara acak oleh MenpanRB tidak memberikan jawaban yang kurang baik.
- b. Menjelaskan contoh pertanyaan yang diberikan oleh MenpanRB biasanya terkait keluhan apa yang paling sering (biaya/sarana prasarana/layanan). Kita harus mengejar nilainya yang paling rendah untuk segera ditindaklanjuti. Juga meminta agar dipastikan, setidaknya ada 30 pengguna loyal.

Demikian hasil Rapat Monev SPKP-SPAK yang dapat kami sampaikan. Rapat ditutup pada pukul 10.45 WIB oleh Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta.

Yogyakarta, 9 Oktober 2025

Notulis



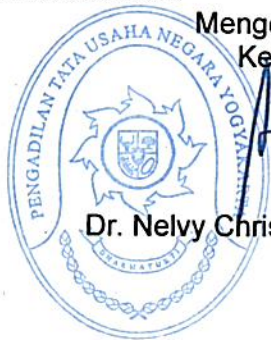
Nanda Padma Parahita, S.H.
NIP. 200010272025062008

Wakil Ketua

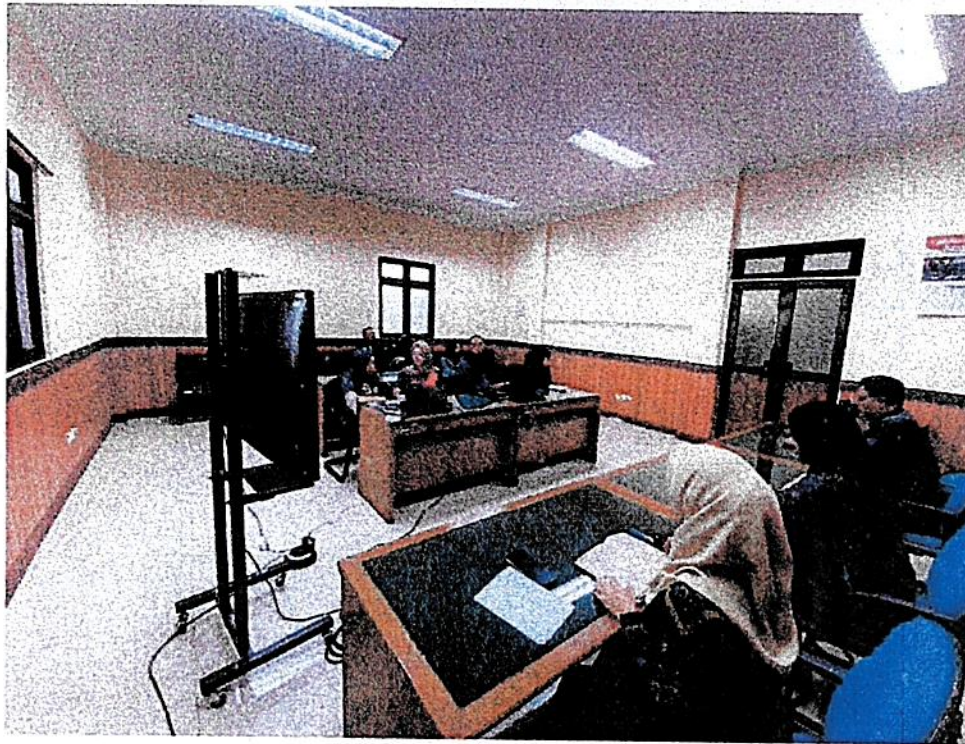


Retno Nawangsih, S.H., M.H.
NIP. 197102201991031001

Mengetahui,
Ketua



Dr. Nelly Christin, S.H., M.H.





**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER
DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA SURABAYA
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA YOGYAKARTA**

Jalan Raya Janti Nomor 66 Kec. Banguntapan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55198
www.ptun-yogyakarta.go.id, ptunjogja@mahkamahagung.go.id

Nomor : 2240/WKPTUN/UND.OT1.2/X/2025
Sifat : Biasa
Lampiran : Satu Lembar
Hal : Rapat Monev SIP, Informasi,
Posbakum dan SEPPIA, ~~SPAK-SPKP~~

Yogyakarta, 8 Oktober 2025

Yth. Para Pejabat pada daftar terlampir.
di Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta

Mengharap kehadiran Bapak / Ibu untuk menghadiri kegiatan Rapat Monev SIP, Informasi, Posbakum dan SEPPIA dengan jadwal sebagai berikut:

pada hari, tanggal	: Kamis, 9 Oktober 2025
waktu	: 09.00 WIB
tempat	: Ruang Pemeriksaan Persiapan
acara	: Rapat Monev SIP, Informasi, Posbakum dan SEPPIA, SPAK-SPKP

Demikian atas kehadiran Bapak/Ibu kami ucapkan terima kasih.

Wakil Ketua,


RETNO NAWANGSIH

LAMPIRAN I

Surat Undangan Nama Jabatan

Nomor : 2240 /PAN/UND.OT1.2/X/2025

Tanggal: 8 Oktober 2025,

DAFTAR PEJABAT/PEGAWAI YANG DIUNDANG

1. Dr. Nelvy Chistin, S.H.,M.H. (Ketua PTUN Yogyakarta)
2. Nieke Zulfahanum, S.H.,M.H.(Hawasbid Kepaniteraan Hukum)
3. Tri Asih Wahyudiati, S.H.,M.Kn (Panitera Muda Hukum)
4. Budi Suryana, S.H.
5. Rahmat Susanta, S.H
6. Andrie Wibowo, S.H.
7. Rifiani Rina M, S.Psi
8. Rizkytyas Sekar Handini, S.H.
9. Nanda Padma Parahita, S.H.
10. Posbakum (LKBH UII)

Wakil Ketua,



RETNO NAWANGSIH



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER
DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA SURABAYA
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA YOGYAKARTA

Jalan Raya Janti Nomor 66 Kec. Banguntapan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55198
www.ptun-yogyakarta.go.id, jogjakarta@ptun.org

DAFTAR HADIR

Money SIP, Posbakum, SEPPIA dan Informasi, SpXP - SPAK

Hari : Kamis
Tanggal : 9 Oktober 2025
Jam : 09.00
Tempat : Ruang Pemeriksaan Persiapan

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	Neluy Chastis	Ketua	
2	Petno Nawangih	Wakil	
3	RIZKY R. BARIED	DIR. LKBB FHUI	
4	Nieke Zulfathanum	Headesbid KepanhuKom	
5	Mr. Zaki	Panitia	
6	TRIASH WAHYUDIATI	PANMUD HUKUM	
7	Rizkiyus Sekar H.	ADP	
8	Budi Sugeng	PP	
9	Rahmat S	PK	
10	Andrie Wibowo.	PP.	
11	Mfani Rina. m	ARSIPARIS	
12	NANDA PADMA	APP - CPNS	
13			